



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 31 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
**UNIT KERJA** : UNIVERSITAS GADJAH MADA

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : SYAHIRUL ALIM  
2. Jabatan : KETUA DEPARTEMEN KEPERAWATAN DASAR DAN EMERGENSI  
3. NHK : 817595

**II. DATA HARTA**

<b>A. TANAH DAN BANGUNAN</b>	Rp.	----
<b>B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN</b>	Rp.	48.000.000
1. LAINNYA, CANNONDALE HOOLIGAN 9 Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000		
2. LAINNYA, SPECIALIZED GLOBE SAN FRANCISCO Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000		
3. LAINNYA, SURLY TROLL Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000		
4. LAINNYA, POLYGON STRATOS S5 Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000		
5. LAINNYA, FNHON BLAST Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000		
<b>C. HARTA BERGERAK LAINNYA</b>	Rp.	25.000.000
<b>D. SURAT BERHARGA</b>	Rp.	----
<b>E. KAS DAN SETARA KAS</b>	Rp.	15.000.000
<b>F. HARTA LAINNYA</b>	Rp.	----
<b>Sub Total</b>	Rp.	88.000.000
<b>III. HUTANG</b>	Rp.	130.000.000
<b>IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)</b>	Rp.	-42.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.